

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kepariwisata ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Vojnovic dan Rade (2013) mengungkapkan bahwa pariwisata mampu memberikan dampak ekonomi yang sangat besar bagi daerah lokal setempat. Menurut Wijaya dan Mustika (2014) yang dikutip oleh Subardini (2017) menjelaskan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Pariwisata Indonesia sudah dikenal oleh wisatawan di beberapa Negara di dunia. Pariwisata dapat menjadi industri andalan untuk daerah yang tidak memiliki sumber daya alam migas, hasil hutan dan industri manufaktur

Pariwisata memberikan kontribusi sebagai sumber pendapatan devisa, penciptaan lapangan kerja, kegiatan produksi dan pendapatan nasional (PDB), pertumbuhan sektor swasta dan pembangunan infrastruktur. Pariwisata juga berpotensi untuk mendorong penerimaan negara dari pajak, terutama pajak tidak langsung (Nizar, 2011).

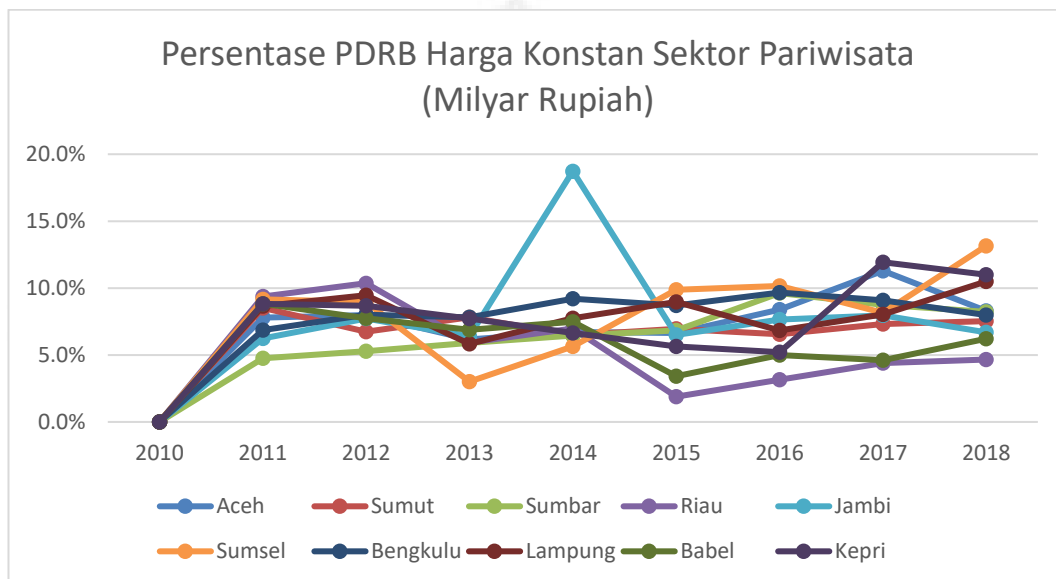
Hal ini memberi kesimpulan bahwa upaya untuk mengembangkan sektor pariwisata merupakan salah satu cara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan permasalahan ekonomi dalam jangka panjang yang perlu diperhatikan. Menurut Suparmoko (1999) ada beberapa faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain tenaga kerja, kapital, sumberdaya alam, tingkat teknologi dan kondisi sosial dalam negara yang bersangkutan.

Tingkat pertumbuhan dari perekonomian dapat ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah tertentu dalam suatu tahun tertentu.

Perkembangan sektor pariwisata di pulau Sumatera setiap tahun semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya PDRB Sektor Pariwisata dari 10 provinsi dipulau Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jambi, Bengkulu, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau dan Bangkabelitung. Nilai PDRB sektor pariwisata ini diproxy dari Bidang Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Berdasarkan Gambar 1.1. di bawah, diketahui bahwa nilai PDRB sektor pariwisata yang tertinggi adalah Provinsi Sumatera Utara yakni 12.131,74 milyar, dan yang terendah adalah Provinsi Bengkulu yakni 738,54 Milyar rupiah.

Gambar 1.1. PDRB Harga Konstan Sektor Pariwisata dan Persentase Pertumbuhannya di 10 Provinsi Sumatera Tahun 2010 – 2018 (dalam Satuan Milyar Rupiah)



Sumber : Data BPS Provinsi diolah

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas diketahui bahwa jika dilihat dari sisi perkembangan persentase PDRB Sektor Pariwisata, maka persentase tertinggi terjadi pada provinsi Jambi yakni sebesar 18,7% yang terjadi pada tahun amatan 2014. Sedangkan persentase kenaikan terendah terjadi pada Provinsi Riau yakni sebesar 1,9% pada tahun amatan 2015. Dari persentase pertumbuhan PDRB sektor pariwisata tersebut, menarik untuk diteliti mana faktor yang mempengaruhi dan perlu diberikan perhatian lebih sebagai skala prioritas pemerintahan provinsi di Pulau Sumatera.

Tentunya meningkatnya persentase pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata dari tahun ketahun dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Hysa (2012) dalam Subardini (2017) salah satu komponen utama yang mempengaruhi pergerakan pariwisata adalah jumlah wisatawan. Selain itu, menurut Wijaya (2014)

mengatakan bahwa, jumlah kunjungan wisatawan merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur pencapaian industri pariwisata dan mampu memberikan dampak terhadap masyarakat dan tentunya pemerintah. Saat ini pariwisata telah menjadi kebutuhan pokok sebagian besar manusia di dunia. Semakin sejahtera seseorang maka semakin banyak peluang dan keinginan untuk melakukan perjalanan wisata. Jumlah kunjungan wisatawan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sektor pariwisata di suatu daerah.

Kepariwisataan tidak saja bergantung atas potensi dan daya tarik wisata yang erat hubungannya dengan motif-motif kunjungan wisata, melainkan juga tergantung atas peranan manajemen pemasaran serta investasi dalam meraih suatu kesempatan atau peluang yang ada (Yoeti, 2008). Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Harrod-Domar (1947) bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan investasi, maka investasi di sektor pariwisata harus ditingkatkan. Banyak peluang bagi investor asing maupun dalam negeri untuk melakukan investasi sektor pariwisata di Pulau Sumatera. Salah satu bentuk investasi dari sektor pariwisata ini adalah jumlah akomodasi atau jumlah hotel yang tersedia, baik hotel berbintang maupun non bintang di tiap provinsi.

Menurut Christiono (2012) dalam Subardini (2017), tingkat hunian hotel sangat berperan dalam peningkatan pendapatan di sektor pariwisata. Austriana (2005) menyebutkan, tingkat hunian hotel juga merupakan salah satu faktor penunjang dalam mempengaruhi pendapatan per kapita dari sektor pariwisata.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, ada 3 faktor yang akan dikaji dan diduga memiliki pengaruhnya terhadap PDRB sektor pariwisata yakni jumlah wisatawan, jumlah investasi hotel dan tingkat hunian kamar.

Wisatawan adalah orang-orang yang datang berkunjung pada suatu tempat atau negara, dengan bermacam-macam tujuan dalam waktu menginap minimal 24 jam dan maksimal yaitu enam bulan.

Wisatawan merupakan unsur utama dalam pariwisata. Terlaksananya kegiatan pariwisata tergantung pada adanya interaksi antara wisatawan dan objek wisata, yang didukung dengan berbagai sarana prasarana pariwisata. Sebuah objek wisata akan dikatakan menarik jika banyak dikunjungi wisatawan (Kuntowijoyo, 2006). Wisatawan adalah aktor dalam kegiatan wisata. Berwisata menjadi sebuah pengalaman manusia untuk menikmati, mengantisipasi dan mengingatkan masa-masa didalam kehidupan. (Ismayanti, 2010). Soebagyo (2012) mengungkapkan, setiap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan akan memberikan efek secara langsung terhadap peningkatan output Produk Domestik Bruto (PDB) juga cadangan devisa, yang kemudian memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain jumlah wisatawan, hotel juga memiliki peranan terhadap PDRB suatu provinsi. Hotel adalah tempat yang disediakan bagi wisatawan untuk menginap selama mereka berkunjung atau tempat dalam melakukan kegiatan wisata. Selain itu, sebelum melakukan kegiatan pariwisata, wisatawan memerlukan informasi tentang informasi daerah yang akan dituju beserta fasilitas-fasilitasnya. Hotel adalah fasilitas akomodasi utama yang ingin diketahui wisatawan sebelum

bepergian. Karena itu, keberadaan hotel ini mutlak dibutuhkan. Jumlah wisatawan cenderung meningkat setiap tahun, sehingga harus diimbangi dengan penyediaan layanan akomodasi untuk wisatawan (Hutasoit, 2017).

Barudin (2001) menjelaskan bahwa fasilitas penginapan menjadi faktor yang menentukan kunjungan wisatawan. Karena, apabila jumlah kamar hotel yang tersedia memadai, maka jumlah wisatawan yang berkunjung meningkat dan semakin banyak pula permintaan terhadap kamar hotel. Saat hotel tersebut terasa nyaman untuk disinggahi, wisatawan akan semakin nyaman untuk tinggal lebih lama lagi. Dengan demikian, industri pariwisata dan kegiatan yang berkaitan dengan penginapan yaitu hotel, akan memperoleh pendapatan pariwisata yang semakin tinggi jika wisatawan semakin lama menginap sehingga akan meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak perhotelan.

Selain jumlah wisatawan dan jumlah investasi hotel, tingkat hunian kamar hotel juga diduga memiliki peran terhadap PDRB sektor pariwisata. Menurut Austriana (2005) tingkat hunian hotel merupakan suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar yang terjual, jika dibandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk dijual. Dengan tersedianya kamar hotel yang memadai, para wisatawan tidak segan untuk berkunjung ke suatu daerah, terlebih jika hotel tersebut nyaman untuk disinggahi.

Menurut Christiono (2012) dalam Subardini (2017) tingkat hunian hotel sangat berperan dalam peningkatan pendapatan di sektor pariwisata. Selain sebagai ajang bisnis, hotel dapat menarik wisatawan luar untuk berkunjung sehingga semakin banyak wisatawan berkunjung maka semakin banyak pula pendapatan

pariwisata yang diperoleh. Tingkat hunian kamar adalah suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar-kamar terjual, jika diperbandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk dijual. Pengertian *rasio occupancy* merupakan tolak ukur keberhasilan hotel dalam menjual produk utamanya, salah satunya yaitu kamar. Tingkat hunian kamar hotel (okupansi hotel) adalah banyaknya kamar yang dihuni dibagi kamar yang tersedia dikalikan 100%. Tingkat okupansi menjadi salah satu unsur pengitung pendapatan hotel.

Variabel tingkat hunian kamar pernah diteliti dan dikaitkan dengan PDRB Sektor Pariwisata sebelumnya, Pertiwi dkk (2017), Munanda dan Amar (2019). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat hunian kamar berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor pariwisata. Tentunya hal ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang pengaruh tingkat hunian kamar terhadap PDRB sektor pariwisata.

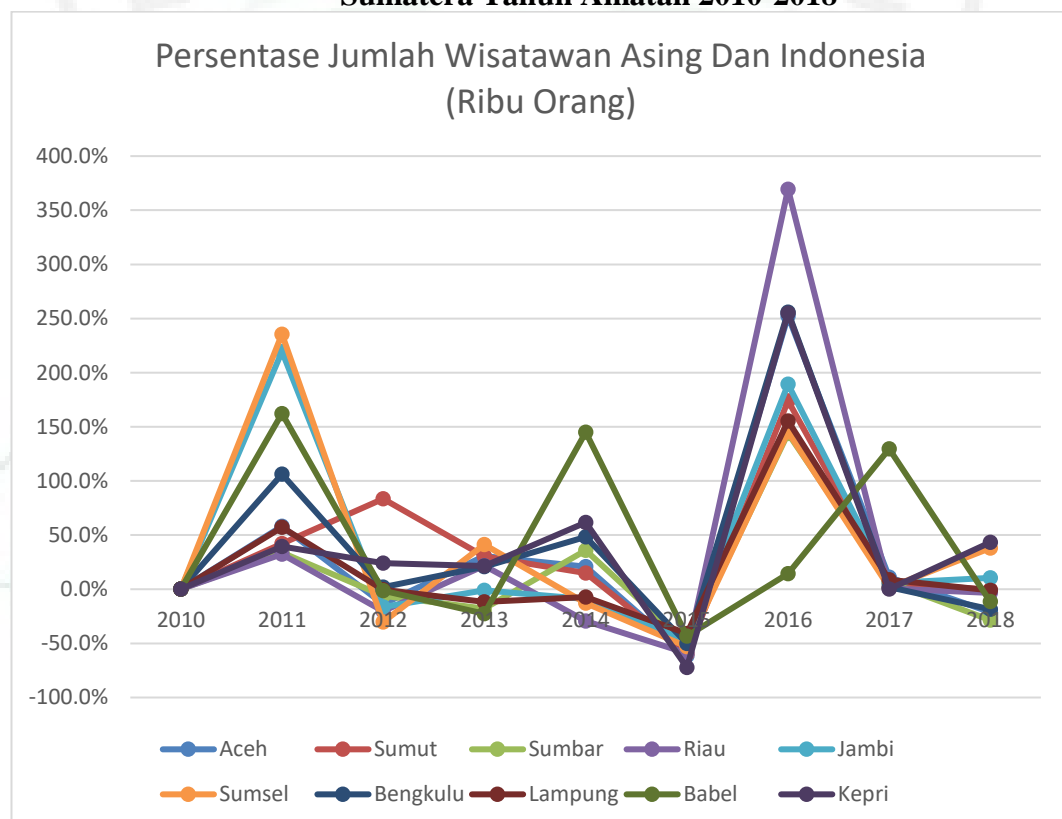
Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dijadikan sumber-sumber penerimaan dalam meningkatkan PDRB, untuk itu masing-masing pemerintahan Provinsi di Pulau Sumatera dapat meningkatkan sektor Pariwisata, Peningkatan penerimaan PDRB sektor pariwisata ini dapat diupayakan dengan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, meningkatkan jumlah akomodasi hotel dan mengupayakan tingkat hunian kamar yang tinggi.

Semakin baik pengelolaan sektor pariwisata suatu daerah, maka akan terjadi kecenderungan semakin tinggi jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Untuk meningkatkan pelayanan wisata, alternatifnya adalah mengadakan investasi sektor pariwisata berupa hotel. Jumlah

hotel adalah suatu indikator produktifitas yang biasa digunakan pada industri pariwisata, semakin tinggi jumlah hotel dan tingkat hunian hotel tersebut permintaan akan pelayanan jasa hotel tersebut akan meningkat dan secara otomatis kegiatan ekonomi dari hotel tersebut akan berdampak pada produk domestik regional bruto daerah setempat.

Berdasarkan Gambar 1.2 di bawah, diketahui bahwa jumlah wisatawan yang tertinggi adalah Provinsi Sumatera Utara yakni 4157,49417 ribu orang, dan yang terendah adalah Provinsi Bangkabelitung yakni 186,601 ribu orang.

Gambar 1.2 Jumlah Wisatawan Asing dan Indonesia di 10 Provinsi Sumatera Tahun Amatan 2010-2018



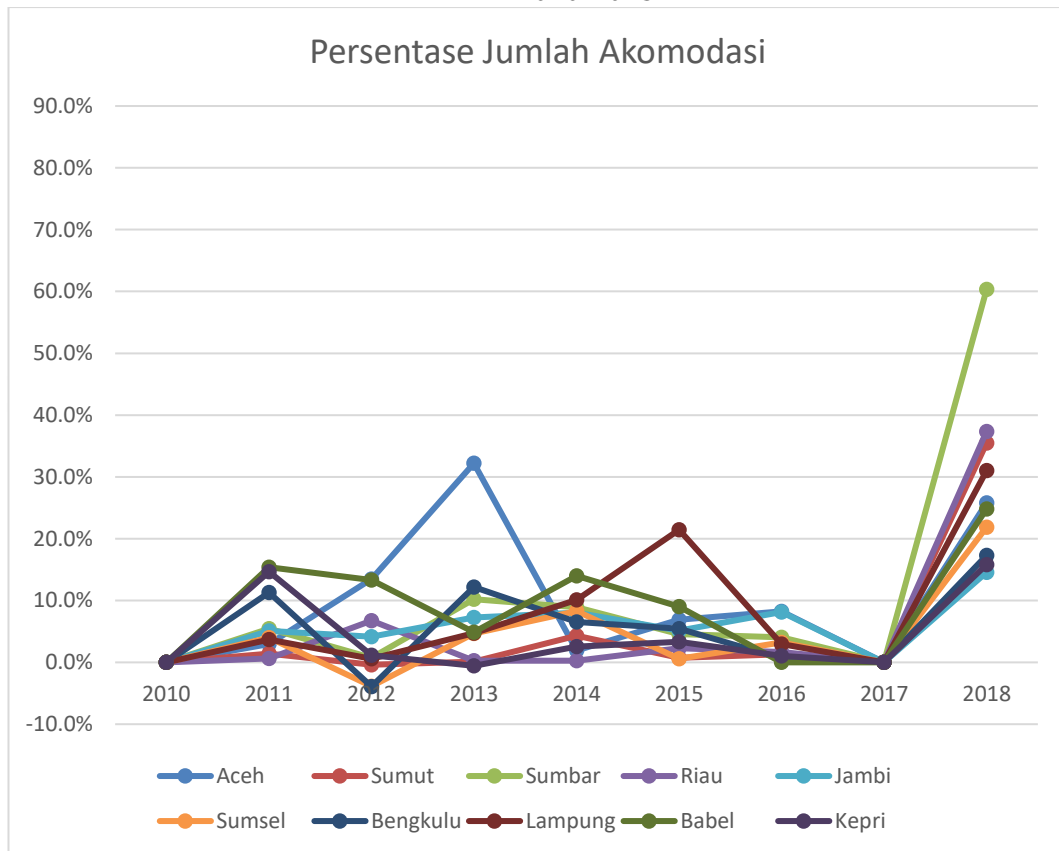
Sumber : Data BPS Provinsi diolah

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas diketahui bahwa jika dilihat dari sisi perkembangan persentase jumlah wisatawan, maka persentase tertinggi terjadi pada Provinsi Riau yakni sebesar 369,4% yang terjadi pada tahun amatan 2016. Sedangkan kenaikan terendah terjadi pada Provinsi Kepri yakni sebesar -72,2% pada tahun amatan 2015. Dapat dilihat pada Gambar 1.2 penurunan kunjungan wisman di tahun 2015 ini antara lain karen faktor cuaca yang menyebabkan musibah banjir dan tanah longsor di beberapa daerah di tanah air. Pada Januari 2015 sebagai puncak turunnya hujan yang disertai awan membawa musibah jatuhnya pesawat Air Asia QZ 8501 rute Surabaya – Singapura di selat Karimata. Selain faktor cuaca, penurunan kunjungan wisman di bulan pertama 2015 juga karena bergesernya musim liburan hari raya Imlek, yang beberapa tahun lalu jatuh pada bulan Januari tahun ini bergeser pada Februari. Beberapa kunjungan wisman seperti dari China dan Taiwan pada Januari ini mengalami penurunan masing-masing sebesar -8,74% dan -17,44%.

Data BPS dan Pusdatin Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyebutkan, dari 16 fokus pasar utama sebanyak 12 pasar mengalami penurunan yakni; Rusia (-47,00%); Malaysia (-20,94%); Taiwan (-17,44%); Timteng (-15,74%); Filipina (-11,06%); Singapura (-10,28%); Jerman (-9,80%); Tiongkok (-8,74%); Amerika Serikat (-5,18%); India (-2,27%); Perancis (-2,03%), dan Belanda (-1,04%).

Berdasarkan Gambar 1.3 di bawah, diketahui bahwa jumlah akomodasi yang tertinggi adalah Provinsi Sumatera Utara yakni 81102 akomodasi, dan yang terendah adalah Provinsi Bengkulu yakni 10319 akomodasi .

Gambar 1.3 Jumlah Akomodasi di 10 Provinsi Sumatera Tahun 2010-2018

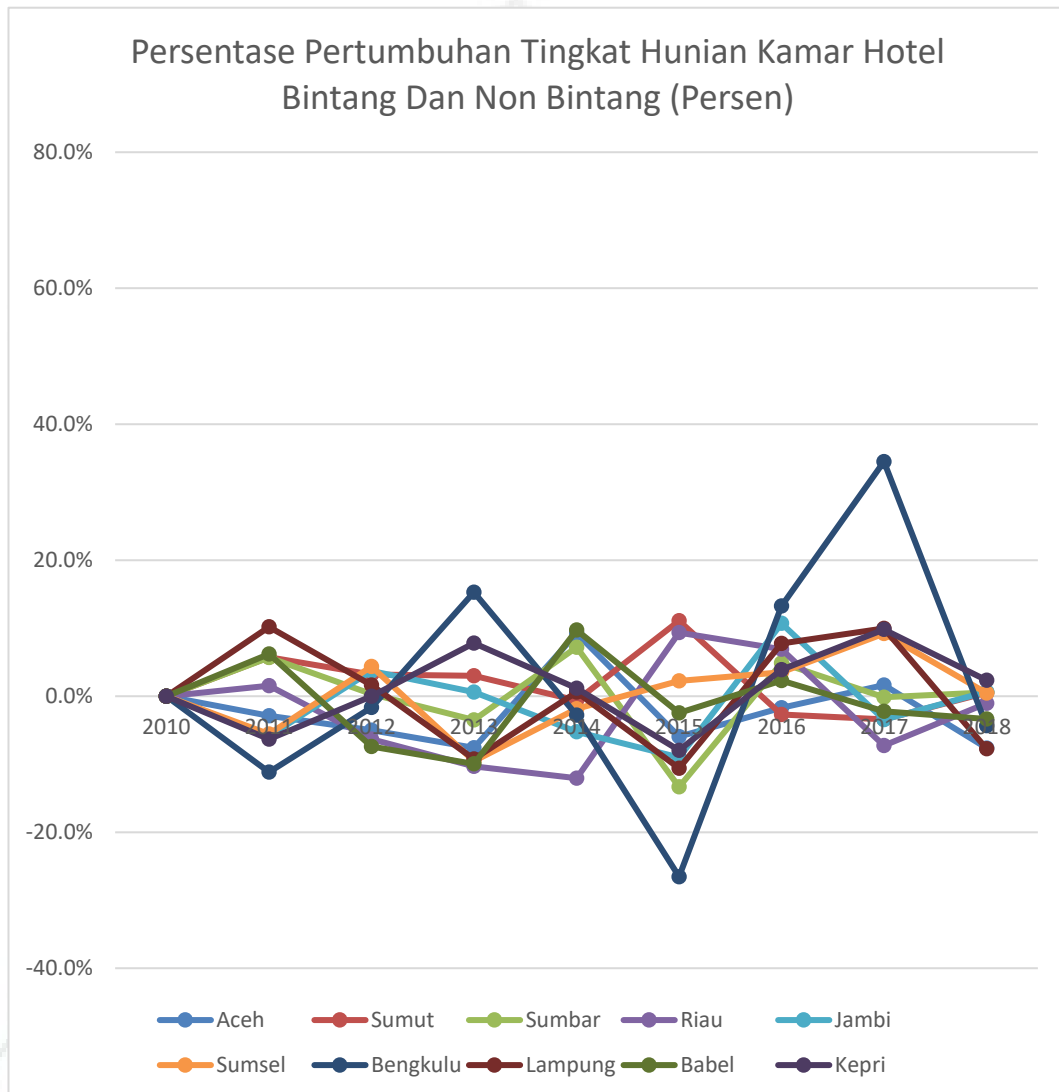


Sumber : BPS Provinsi, Diolah

Berdasarkan Gambar 1.3 di atas diketahui bahwa jika dilihat dari sisi perkembangan persentase akomodasi (penginapan, kamar, tempat tidur), maka persentase tertinggi terjadi pada Provinsi Sumatera Barat yakni sebesar 60,3% yang terjadi pada tahun amatan 2018. Sedangkan persentase kenaikan terendah terjadi pada Provinsi Jambi yakni sebesar 14,6% pada tahun amatan 2018.

Berdasarkan Gambar 1.4 di bawah, diketahui bahwa tingkat hunian kamar yang tertinggi adalah Provinsi Riau yakni sebesar 53,8% yang terjadi pada tahun amatan 2011, dan yang terendah adalah Provinsi Bengkulu yakni sebesar 27,1% yang terjadi pada tahun amatan 2015.

Gambar 1.4 Tingkat hunian Kamar Hotel Bintang dan Non Bintang di 10 Provinsi Sumatera Tahun 2010-2018



Sumber : BPS Provinsi, Diolah

Berdasarkan Gambar 1.4 di atas diketahui bahwa jika dilihat dari sisi perkembangan persentase tingkat hunian kamar, maka persentase tertinggi terjadi pada Provinsi Bengkulu yakni sebesar 34,5% pada tahun amatan 2017, dan persentase kenaikan terendah juga terjadi pada Provinsi Bengkulu yakni sebesar -26,5% pada tahun amatan 2015.

Berdasarkan latar belakang dan pendapat ahli di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mengenai wisatawan, investasi hotel dan tingkat hunian kamar sepuluh Sumatera dalam rangkaian penelitian yang berjudul “**Analisis Determinan PDRB Sektor Pariwisata Di 10 Provinsi Sumatera Tahun 2010-2018**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh jumlah wisatawan terhadap PDRB Sektor Pariwisata di 10 Provinsi Sumatera?
2. Apakah terdapat pengaruh jumlah akomodasi terhadap PDRB Sektor Pariwisata di 10 Provinsi Sumatera?
3. Apakah terdapat pengaruh tingkat hunian kamar terhadap PDRB Sektor Pariwisata di 10 Provinsi Sumatera?
4. Apakah terdapat pengaruh jumlah wisatawan, jumlah akomodasi, tingkat hunian kamar terhadap PDRB Sektor Pariwisata di 10 Provinsi Sumatera?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan terhadap PDRB Sektor Pariwisata di 10 Provinsi Sumatera.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah akomodasi terhadap PDRB Sektor Pariwisata di 10 Provinsi Sumatera.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat hunian kamar terhadap PDRB Sektor Pariwisata di 10 Provinsi Sumatera.

4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan, jumlah akomodasi, tingkat hunian kamar terhadap PDRB Sektor Pariwisata di 10 Provinsi Sumatera.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan penulis tentang kontribusi pariwisata terhadap PDRB Sektor Pariwisata.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah provinsi di 10 Provinsi Sumatera dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan sektor pariwisata.
3. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi dan perbandingan dalam penelitian lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya.